



## Jampersal Miliki Payung Hukum

**YOGYA (MERAPI)** - Realisasi program jaminan persalinan (jampersal), sudah memiliki payung hukum seiring ditetapkannya Peraturan Walikota (Perwal) No 56 tahun 2011 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Persalinan di Puskesmas. Dengan demikian, warga Kota Yogya sudah bisa mengakses pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas, pemeriksaan bayi baru lahir dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) secara gratis.

Hal tersebut ditegaskan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Yogyakarta, Tuty Setyowati dalam jumpa pers di Kompleks Balaikota, Senin

(18/7).

Tuty menjelaskan, sebelumnya ada persoalan selisih pembiayaan yang dibebankan pada pemberi pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun rumah sakit.

Dalam Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, biaya melahirkan normal sebesar Rp 523.000, padahal klaim menurut Permenkes Nomor 631 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jampersal hanya Rp 350.000, sedangkan kelahiran dengan penyulit, biaya klaim sebesar Rp 500.000. Dalam Perwal yang baru sudah diatur adanya pengurangan biaya dan pembebasan biaya. **(Unt)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005